

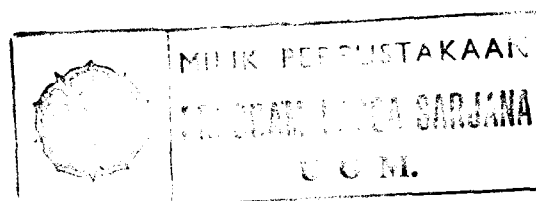


INTISARI

Banyak para sarjana mengkarakteristikan sistem politik rezim Orde Baru seperti halnya rezim sebelumnya (rezim Orde Lama). Berbagai istilah umumnya mengandung kesamaan konsep yang dipergunakan untuk menjelesakan fenomena baru dari otoritarianisme. Sebagian dari mereka menilai rezim Soeharto dan rezim Soekarno dengan label “rezim neo-patrimonial” (B. Anderson, 1972), “negara pegawai” (McVey 1982), “kepolitikan birokrasi” (Jackson 1978), “personal rule” (Liddle 1985), “technocratic state” (J.J. Mc Dougal 1986), “otoritarianisme birokratik”, (D.Y. King, 1982).

Akan tetapi, fenomena Orde Baru tidak dapat dijelaskan oleh salah satu model kepolitikan, karena karakteristik politik Orde Baru selalu berubah-ubah, dan pada umumnya berbagai model kepolitikan yang dipakai untuk menjelaskan politik Indonesia sudah dipergunakan untuk menjelaskan politik negara lain. Dengan demikian, masing-masing model kepolitikan mempunyai kelemahan dan kelebihan dalam menerangkan realitas politik Orde Baru, untuk itu, tidak ada model yang khusus untuk menerangkan politik Orde Baru.

Pada umumnya, karakteristik dari penomena politik Orde Baru adalah sebagai berikut: Dominasi peran militer, kebijakan yang teknokratik, pembatasan partisipasi massa, dan dukungan keuangan internasional. Berdasar pada karakteristik tersebut, model kepolitikan otoritarianisme birokratik lebih mendekati dalam menjelaskan politik Orde Baru. Dengan demikian, model otoriterisme birokratik lebih signifikan dalam analisis politik nasional dibawah Orde Baru dibanding dengan model lain.





ABSTRACT

Many scholars characterize the political system of the New Order just like the previous regime the Old Order. There are various terms used to explain the new phenomenon of authoritarianism. Some of the scholars characterize the Soeharto's regime as well as Soekarno's regime with the label of "*neopatrimonial regime*" (B. Anderson 1972), "*Beamtenstaat*" (McVey 1982), "*Bureaucratic Polity*" (Jackson 1978), "*Personal Rule*" (Liddle 1985), "*Technocratic State*" (J.J. Mc Dougall 1986), "*Bureaucratic Authoritarian*" (D. Y King 1982).

But, the phenomenon of the New Orde could not be explained by one of the political models, because the characteristic of New Order politics always changes. And, generally, the models which are adopted to explain Indonesian Politics have already been utilized in explaining the politics of other country before. Therefore, each political model its own different weaknesses and strength in explaining the realities of New Order politics, so that, is no special model for explaining the Indonesian politics.

In several, the main characteristics of the phenomenon of the New Order Politics, are; the domination of military rule, technocratic policy, restricted participation, international monetary supports. According to the characteristic, bureaucratic authoritarian political model is more relevant in explaining the New Order Politics. So, the model of a bureaucratic authoritarian regime is more significant in analysing of national level politics under the New Order administration than other models.

